

ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DI UNIVERSITAS TADULAKO

Fajriani

Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The study intends to determine and analyse: 1) financial efficiency of Public Service Agency in Tadulako University; 2) financial effectiveness of Public Service Agency in Tadulako University; 3) financial independency of Public Service Agency in Tadulako University. Type of study is descriptive, which is aimed to comprehensively analyse and describe financial efficiency, effectiveness, and independency of the Public Service Agency in Tadulako University. The study finds that the efficiency ratio indicates that financial management of Tadulako University is less efficient with an average ratio of 105%. Financial management effectiveness ratio of 104% or very effective in average. This is indicate by greater revenue than planned realizations. Financial independence management ratio of Tadulako University in six years is 34% or in the consultative category.

Keywords: *efficiency, effectiveness, and independency*

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang keuangan Negara ditandai dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara, termasuk pengelolaan uang dibendahara.

Reformasi bidang keuangan adalah pergeseran dari pengelolaan keuangan tradisional ke sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Pentingnya reformasi keuangan pemerintah dengan beberapa bidang di atas dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis yang terutama diwakili oleh luasnya skala persoalan yang harus diatasi, di antaranya: 1) Rendahnya efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. 2) Tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses

pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. 3) Terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek KKN. 4) Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik.

Pemerintah menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang mengakibatkan perubahanmen dasar pada format dan isi DIPA. Perubahan tersebut lebih memberikan keleluasaan pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola anggarannya sehingga diharapkan pencapaian kinerja menjadi lebih optimal. DIPA yang disusun untuk tiap-tiap satker memuat informasi meliputi Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (*Outcome*), Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Keluaran (*Output*), Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan per bulan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2011).

Dewasa ini, isu-isu tentang otonomi tidak saja berpengaruh terhadap perubahan pengelolaan daerah, tetapi juga telah merambah pada pengelolaan sistem perguruan tinggi. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah mapan, sedikit demi sedikit berusaha menjadi mandiri dengan melepaskan diri dari ketergantungannya kepada pemerintah, dalam hal pengelolaan keuangan. Kinerja kemandirian keuangan PTN adalah kemampuan PTN untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangannya dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Keluarnya peraturan pemerintah seperti Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang pada tahun 2009 digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, disambut baik oleh beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mapan tersebut, sebagai langkah awal untuk menjadi PTN yang mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan pemerintah pusat. Pemerintah memberlakukan beberapa organisasi Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Layanan Umum hingga mendorong Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pembangunan sistem informasi akuntansi baru dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi.

Universitas Tadulako adalah entitas akuntansi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Jumlah pendapatan terus mengalami peningkatan, tahun 2011 naik sebesar 0,79 % jika dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 pendapatan negara naik 0,85% dibandingkan dengan tahun 2011. Tahun 2013 naik sebesar 0,79% dibandingkan tahun 2012, dan naik 0,82% ditahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Tahun 2015 turun sebesar 1.33% jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Realisasi belanja tahun 2011 terlihat terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 0,62 %. Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2011. Penurunan belanja sebesar 1.02% terjadi pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0.82% dibandingkan dengan tahun 2013. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0.78% jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Pendapatan Universitas Tadulako terdiri dari pendapatan penjualan dan sewa, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan jasa pelayanan pendidikan, pendapatan hibah, pendapatan BLU lainnya, pendapatan dari pemindahtanganan BMN, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL, penerimaan kembali belanja lainnya TAYL, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, dan pendapatan hasil kerjasama Pemda. Sedangkan belanja Universitas Tadulako terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.

Universitas Tadulako resmi menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012

tanggal 3 April 2012. Aplikasi penerapan secara umum di Universitas Tadulako tanggal 1 Juli 2012 dan pembenahan terus dilakukan dalam penyempurnaan penerapannya, dengan menerapkan PK-BLU, Universitas Tadulako memiliki kemandirian dalam pengelolaan kekayaan (sumber dana), yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Visi Universitas Tadulako adalah Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian. Misi Universitas Tadulako merupakan perwujudan dari fungsi, peranan dan tugas pokok perguruan tinggi sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), yang mulai diadopsi sejak tahun 2012 diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan, profesionalisme, transparan dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. Akuntabilitas kegiatan BLU dalam bentuk laporan berimplikasi jika laporan tersebut baik maka tata kelola BLU tersebut juga ikut membaik. Terciptanya tata kelola Universitas BLU yang baik, maka diharapkan akan dapat membuat keharmonisan internal pelaksanaan pengelolaan BLU.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai Efisiensi, Efektifitas, dan Kemandirian Keuangan pada Badan Layanan Umum di Universitas Tadulako.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pusat Universitas Tadulako yang secara

keseluruhan melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian, yang terdiri dari seluruh pegawai keuangan BLU dan pegawai bidang perencanaan anggaran dilingkungan kantor Universitas Tadulako Palu, dimana terdapat 1 orang Kepala Biro Bidang Umum dan Keuangan, 1 orang Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, 1 orang Kepala Sub Bagian PPNBP, 1 orang Kepala Sub Bagian PNPBP, 1 orang Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, 6 orang Staf PPNBP, 5 orang Staf PNPBP, 2 orang Staf Perencanaan anggaran dan 3 orang Staf Akuntansi dan Pelaporan.

Teknik analisis data sebagai alat analisis untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah:

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pengelolaan keuangan yaitu besarnya rasio pengeluaran belanja terhadap penerimaan, yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara biaya pengeluaran dengan realisasi penerimaan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan .

Tabel 1. Efisiensi Keuangan

Efisiensi Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	>60 – 80
Cukup Efisien	>80 – 90
Kurang Efisien	>90 – 100
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber: Mahsun dalamWidhiono, 2014

2. Rasio Efektifitas

Efektifitas pengelolaan keuangan yaitu besarnya rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan yang ditetapkan, yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan Yang Telah Ditetapkan}} \times 100\%$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. Efektifitas Keuangan

Efektifitas Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Mahsun dalam Widhiono, 2014.

3. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangann yaitu kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan, yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian dan kemampuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Kemampuan Keuangan, Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif

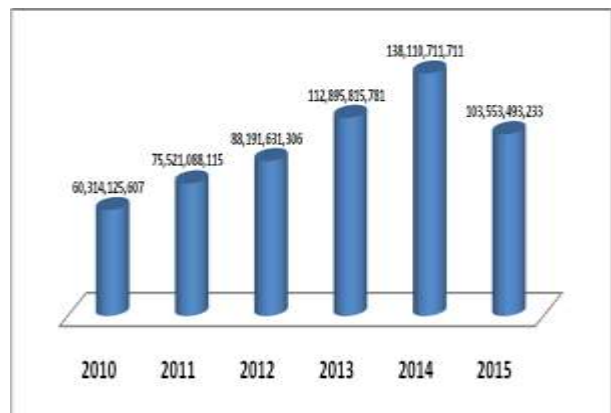
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim dalam Musfira, 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penerimaan dan Belanja Universitas Tadulako Tahun 2010 - 2015

Trend perkembangan penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum akan disajikan pada grafik berikut:



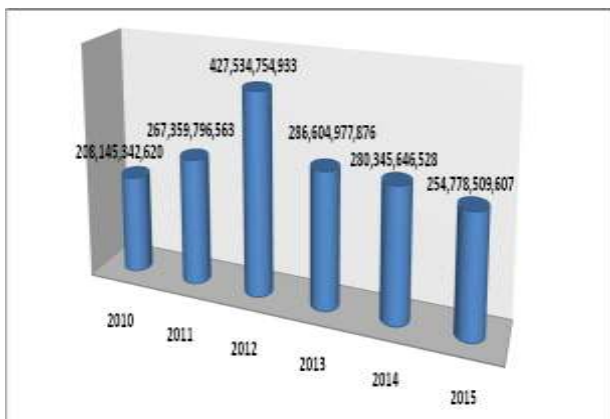
Grafik 1. Penerimaan Pendapatan BLU

Jumlah penerimaan pendapatan PNBPN meningkat, hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa baru pada tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi penerimaan PNBPN tersebut. Komponen PNBPN penerimaan pendapatan ini terkait dengan mahasiswa masih terpisah seperti pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan Akhir pendidikan. Tahun 2012 Universitas Tadulako melaksanakan penerimaan dengan proses pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum setiap tahunnya meningkat karena jumlah mahasiswa yang masuk semakin banyak, karena Universitas Tadulako merupakan universitas

negeri pertama di Sulawesi Tengah dan fasilitas yang semakin baik serta akreditasi yang dimiliki setiap Prodi standar B, olehnya inilah yang menjadikan salah satu alasan mereka memilih Universitas Tadulako.

Pendapatan penerimaan Badan Layanan Umum ini memiliki komponen penerimaan yang dilakukan secara keseluruhan. Mahasiswa yang mendaftar di Universitas Tadulako pembayaran dituangkan keseluruhan dalam pendapatan jasa pelayanan pendidikan, sehingga pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan tidak ada lagi yang dibayarkan, selain itu penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum juga diperoleh dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-perorangan, dan pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan. Tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pendapatan dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pengalihan kementerian dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kemeterian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

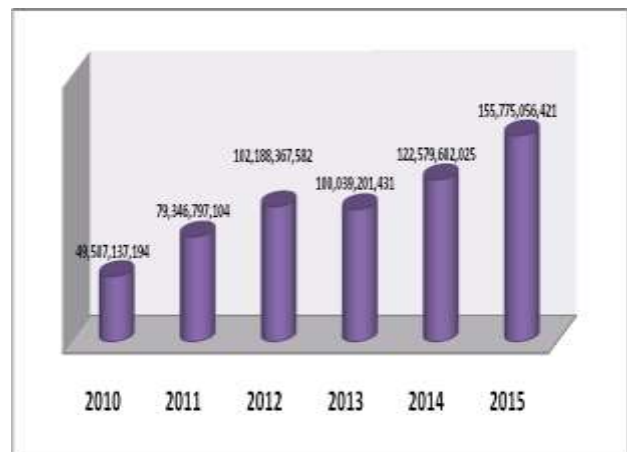
Jumlah penerimaan bantuan pemerintah pusat yang di berikan kepada Universitas Tadulako dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2. Penerimaan Bantuan Pemerintah Pusat

Grafik 2, menunjukkan bahwa penerimaan bantuan dari pemerintah pusat mengalami fluktuasi. Tahun 2012 merupakan tahun yang mendapatkan bantuan dana terbesar dari pemerintah pusat, yaitu sebesar 427.534.754.933. Tahun 2012 ini mulai diberlakukan proses penerimaan dana sebagai BLU, BLU membuat sistem pengelolaan keuangan Universitas Tadulako dilakukan secara mandiri, mulai tahun ini juga Universitas Tadulako mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk memperbaiki sarana dan prasarana kampus, pada tahun tersebut pula universitas membenahi setiap gedung dan setiap program studi untuk memberikan pelayanan yang baik, sebab pembayaran untuk masuk ke Universitas Tadulako lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pihak universitas dituntut untuk menyediakan fasilitas yang baik guna sebagai penunjang media pembelajaran. Sejumlah bantuan yang diperoleh tersebut menjadi pendorong bagi Universitas Tadulako menjadi kampus terbesar di Propinsi Sulawesi Tengah.

Trend peningkatan belanja perguruan tinggi Universitas Tadulako selama 6 (enam) tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. Belanja Universitas Tadulako Palu

Grafik 3, menunjukkan trend peningkatan belanja pada perguruan tinggi Universitas Tadulako mengalami fluktuasi. Belanja yang paling tertinggi berada di tahun 2015. Komposisi belanja Universitas Tadulako terdiri dari beban layanan dan umum yang mana termasuk dalam kategori belanja barang. Beban layanan terus meningkat, yang dimaksud dengan beban layanan adalah beban yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pendidikan. Sedangkan beban umum dan administrasi adalah beban yang dikeluarkan untuk mendukung layanan pendidikan, yang termasuk ke dalam layanan pendidikan termasuk di dalamnya beban pegawai untuk pendidik; beban depresiasi dan amortisasi untuk asset yang digunakan kegiatan pendidikan; bahan yang digunakan dalam aktifitas pendidikan; beban jasa layanan untuk pemeliharaan, jaringan internet; beban perjalanan dinas dan akomodasi untuk kegiatan pendidikan dan biaya lainnya yang dikeluarkan.

Besaran beban umum dan administrasi yang berhubungan dengan beban tenaga kependidikan dan beban untuk mendukung kegiatan selain kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Beban pegawai untuk manajemen dan tenaga kependidikan; Beban depresiasi dan amortisasi untuk asset yang digunakan kegiatan perkantoran; bahan yang digunakan dalam aktifitas perkantoran; beban jasa layanan untuk

pemeliharaan, jaringan internet; beban perjalanan dinas dan akomodasi untuk kegiatan tenaga kependidikan dan biaya lainnya, adapun belanja modal yang digunakan sebagai belanja pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Universitas Tadulako Palu

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran dan masukan. Dua pengertian efisiensi dalam teori ekonomi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal. Hasil perhitungan rasio efisiensi pada perguruan tinggi Universitas Tadulako selama 6 (enam) tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Universitas Tadulako Palu

No	Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan	Efisiensi Pengelolaan Keuangan	Kriteria
1	2010	49.507.137.194	60.314.125.607	82%	Cukup efisien
2	2011	79.346.797.104	75.521.088.115	105%	Tidak efisien
3	2012	102.188.367.582	88.191.631.306	116%	Tidak efisien
4	2013	100.039.201.431	112.895.815.781	89%	Cukup efisien
5	2014	122.579.602.025	138.110.711.711	89%	Cukup efisien
6	2015	155.775.056.421	103.553.493.233	150%	Tidak efisien
Rata-rata		101.572.693.626	96.431.144.292	105%	Tidak efisien

Sumber: Universitas Tadulako, Tahun 2016

Efisiensi dalam penggunaan dana dilakukan pada tahun 2010 yaitu sebesar 82%, hal ini ditunjukkan besarnya penerimaan pendapatan dibandingkan dengan realisasi belanja yang dilaksanakan dan pada tahun 2010. Tahun 2011 pengelolaan keuangan tidak efisien sebesar 105%. Pada tahun 2010 sampai 2011 pengelolaan keuangan masih melalui KPPN. Tahun 2012 pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem BLU, penggunaan dana yang dilakukan pada 2012 ini tidak efisien sebesar 116%, dikarenakan realisasi belanja masih lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan. Tahun 2013 dan 2014 pengelolaan keuangan dinilai efisien yaitu sebesar 89%, dan kembali menjadi tidak efisien pada tahun 2015 yaitu sebesar 150%.

Kesiapan untuk melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tersebut ditunjukkan melalui evaluasi diri yang menyeluruh baik dalam aspek program akademik, sumberdaya manusia (SDM), sarana-prasarana, maupun keuangan. Pemberian otonomi tidak berarti pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan.

Komponen belanja yang dilakukan oleh perguruan tinggi Universitas Tadulako adalah belanja barang yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya, sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja modal, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa yang cukup besar pengeluarannya setiap tahun adalah belanja modal gedung dan bangunan karena perguruan tinggi Universitas Tadulako terus membenahi dan memperbaiki citra salah satunya pemanfaatan dan perbaikan gedung.

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian Widhiono (2014), yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sebelum dan setelah pelaksanaan badan layanan umum tergolong tidak efisien dan efektif.

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Sumenge 2013). Sedangkan Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output, karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Universitas Tadulako Palu

Mardiasmo (2002) mengatakan efektifitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian

rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Bastian,2005).

Penelitian ini mengukur efektifitas dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan terhadap target penerimaan yang akan dilakukan. Adapun hasil perhitungan efektifitas yang dilakukan selama 6 (enam) tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Universitas Tadulako Palu

No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan Yang Telah Ditetapkan	Efektifitas Pengelolaan Keuangan	kriteria
1	2010	60.314.125.607	69.841.596.000	86%	Cukup efektif
2	2011	75.521.088.115	50.742.965.000	149%	Sangat efektif
3	2012	88.191.631.306	72.264.055.000	122%	Sangat efektif
4	2013	112.895.815.781	85.614.060.000	132%	Sangat efektif
5	2014	138.110.711.711	93.142.669.000	148%	Sangat efektif
6	2015	103.553.493.233	186.842.000.000	55%	Tidak efektif
Rata-rata		578.586.865.753	558.447.345.000	104%	Sangat efektif

Sumber: Universitas Tadulako, Tahun 2016

Tahun 2010 pengelolaan keuangan cukup efektif yaitu sebesar 86%. Tahun 2011 pengelolaan keuangan sangat efektif sebesar 149%. Tahun 2012 dimana sistem BLU mulai diterapkan, pengelolaan keuangan sangat efektif sebesar 122%. Tahun 2013 pengelolaan keuangan sangat efektif sebesar 148%, begitu juga tahun 2014 sudah sangat efektif sebesar 148%. Tetapi pada tahun 2015 pengelolaan keuangan tidak efektif sebesar 55%. Hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Universitas Tadulako dalam periode 2010-2015 rata-rata tergolong sangat efektif dikarenakan memiliki nilai rasio efisiensi ≥ 100 yang menurut pendapat Mahsun dalam Widhiono (2014) berada dalam kategori sangat efektif. Jika dirata-ratakan maka diketahui pula bahwa selama periode 2010-2015 rasio efektifitasnya sebesar 104% atau memiliki nilai sangat efektif.

Penerimaan pendapatan atau target yang ditentukan selama 6 (enam) tahun sesuai dengan realisasi yang terjadi. Tingginya penerimaan pendapatan sebab adanya penerimaan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya, Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan, Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan usaha, Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan, Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda, Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Orientasi dari BLU ini adalah merubah paradigma penganggaran dan mempersiapkan

infrastruktur yang dapat mendukung terciptanya informasi anggaran yang terpercaya serta bagaimana mengaitkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai acuannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit lembaga yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, dan saat ini Universitas Tadulako telah memiliki rumah sakit.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Widhiono (2014), yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sebelum pelaksanaan badan layanan umum tergolong tidak efisien dan efektif, sedangkan kinerja pengelolaan keuangan setelah pelaksanaan badan layanan umum tergolong tidak efisien dan cukup efektif.

Kemandirian Keuangan Universitas Tadulako Palu

Kemandirian keuangan yang dilakukan oleh Universitas Tadulako Palu selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Kemandirian Keuangan Universitas Tadulako Palu Tahun 2010-2015

No	Tahun	Penerimaan BLU	Bantuan Pemerintah Pusat	Kemandirian Keuangan	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1	2010	60.314.125.607	208.145.342.620	29%	Rendah	Konsultatif
2	2011	75.521.088.115	267.359.796.563	28%	Rendah	Konsultatif
3	2012	88.191.631.306	427.534.754.933	21%	Rendah Sekali	Instruktif
4	2013	112.895.815.781	286.604.977.876	39%	Rendah	Konsultatif
5	2014	138.110.711.711	280.345.646.528	49%	Rendah	Konsultatif
6	2015	103.553.493.233	254.778.509.607	41%	Rendah	Konsultatif
Rata-rata		96.431.144.292	287.461.504.688	34%	Rendah	Konsultatif

Sumber: Universitas Tadulako, Tahun 2016

Tingkat kemandirian keuangan Universitas Tadulako saat ini termasuk konsultatif atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015 termasuk dalam kategori konsultatif atau tingkat kemandirian rendah, sedangkan tahun 2012 tingkat kemandirian termasuk dalam kategori rendah sekali atau instruktif. Tahun 2012 ini berdasarkan data yang diperoleh bantuan pemerintah pusat cukup tinggi, karena pada tahun ini pengelolaan keuangan Universitas Tadulako beralih menjadi pengelolaan keuangan BLU, dan juga mendapat bantuan operasional perguruan tinggi negeri.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk Universitas Tadulako setelah diterapkan pengelolaan keuangan secara BLU cenderung menurun dengan kata lain pemerintah pusat mengurangi campur tangannya karena Universitas Tadulako dianggap mampu membenahi pengembangan perguruan tinggi tersebut salah satunya dengan penambahan dan perbaikan setiap gedung program studi, informasi dan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang perkuliahan cukup baik sehingga banyak mahasiswa yang berminat untuk kuliah diperguruan tinggi tersebut. Selain itu beberapa peningkatan program studi salah

satunya adanya penambahan program studi Doktorat yang mampu menarik perhatian masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di Kota Palu. Selain sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliahan, perguruan tinggi Universitas Tadulako mampu memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pengakuan akreditasi perguruan tinggi tersebut minimal akreditasi B dan mampu meluluskan sekitar 1300 orang pertahunnya.

Mardiasmo (2002:121) mengatakan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment sistem.

Kemandirian keuangan ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007, hal. 233).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

kesimpulan

1. Efisiensi pengelolaan keuangan Dana BLU Universitas Tadulako menunjukkan selama enam tahun terjadi pengelolaan yang fluktuatif. Pengelolaan selama 6 tahun tersebut jika dirata-ratakan maka diperoleh hasil sebesar 105% atau tidak efisien.
2. Efektifitas pengelolaan keuangan Dana BLU Universitas Tadulako rata-rata selama enam tahun sebesar 104% atau terjadi pengelolaan keuangan yang sangat efektif.
3. Kemandirian pengelolaan keuangan dana BLU Universitas Tadulako menunjukkan selama enam tahun menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah atau termasuk kategori konsultatif.

Rekomendasi

1. Harus ada peningkatan efisiensi dalam pencapaian kinerja pengelolaan keuangan pada Universitas Tadulako.
2. Rasio efektifitas pengelolaan keuangan sistem BLU pada Universitas Tadulako mampu mempertahankan target yang dicapai dan realisasi yang terjadi, hal ini karena proses pelayanan yang baik dan citra kepada masyarakat menjadi universitas terdepan di Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Rasio kemandirian pengelolaan keuangan sistem BLU pada Universitas Tadulako setidaknya dapat ditingkatkan melalui peningkatan layanan kepada mahasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan dan pengajaran, serta bagaimana memajukan universitas Tadulako menjadi universitas terbaik di seluruh Indonesia Timur.
4. Pengelolaan keuangan hendaknya dilakukan dengan proses yang lebih riil atau pengeluaran sesuai dengan bukti pembelanjaan agar kiranya mendapatkan predikat status wajar tanpa pengecualian

dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Sulawesi Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Magister Manajemen (S2) pada Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah. Penulis akui bahwa sejak penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak terutama Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si, dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Muh. Yunus Kasim, S.E, M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Anggaran 023. 2010. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2010*. Palu: Universitas Tadulako.
- Bagian Anggaran 023. 2011. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2011*. Palu: Universitas Tadulako.
- Bagian Anggaran. 2012. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012*. Palu: Universitas Tadulako.
- Bagian Anggaran 023. 2013. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013*. Palu: Universitas Tadulako
- Bagian Anggaran 023. 2014. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014*. Palu: Universitas Tadulako

- Bagian Anggaran 023. 2015. *Laporan Keuangan Universitas Tadulako Palu Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015*. Palu: Universitas Tadulako
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: suat pengantar*, Erlangga., Jakarta
- Dewi, P. Dan Ayu Ratna, Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8.3:442-457
- Lukman, Mediya. 2013. *Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai :Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN., Yogyakarta.
- _____. 2007. *Bunga Rampai :Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN., Yogyakarta.
- Karinda, Chrisman Youlli. 2013. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountibility*. Vol. 2 No. 2: 73-84
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE., Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi., Yogyakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgetting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. BPFE., Yogyakarta.
- Musfira. 2013. Analisis Rasio Kemandirian, Aktivitas, Efektifitas Dan Efisiensi Untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palu. *Tesis*. Palu: Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Orniati, Yuli. 2009. Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Tahun 14, Nomor 3: 206-213.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 65/PB/2010 tentang *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2011 Tentang *Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 *Tentang Statuta Universitas Tadulako*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Pratiwi, Tri Kartika Dan Ferry Madi Ika Pratama. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 14 No.2: 118-127
- Rohim, Saiful. 2014. Pengaruh Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*, Palu: Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Santoso, Eko. 2011. Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. *Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sularso, Hafid Dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa

- Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 2: 109-124.
- Sutawijaya Adrian, Ety Puji Lestari. 2009. Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Aebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10 No.1 Juni 2009:Hal 49-67.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007.Menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiscal daerah. *Tesis*, tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ujiyantho, Muh. Arief Dan Bambang Agus Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kierja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur)*.Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, 26-28 Juli.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press, Malang.
- Undang-Undang APBN No. 47 Tahun 2009 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010*.
- Undang-undang RI Nomor1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Widhiono, Fransiskus Novi Indriadi. 2014.Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.*Tesis*. Palu: Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.